

POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD TERHADAP PENYUSUNAN RKPd TAHUN 2021

BIDANG PEMERINTAHAN

(disusun oleh : Anang Sabtoni, Marsudi)

A. PENDAHULUAN

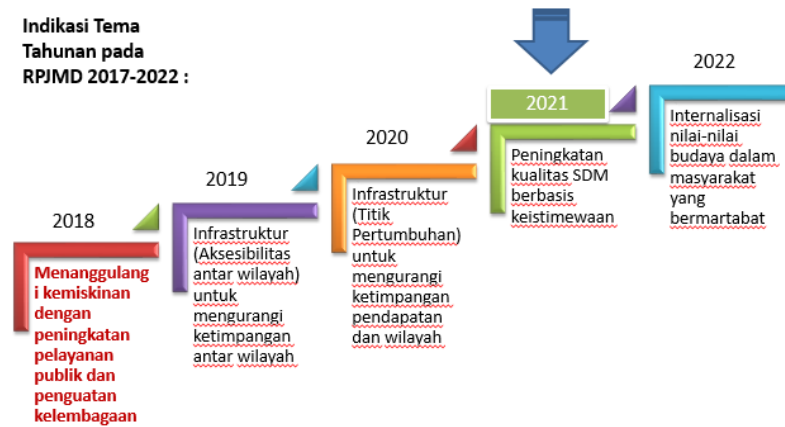
Persoalan kebijakan pembangunan di D.I Yogyakarta masih fokus pada persoalan angka kemiskinan, kesenjangan pendapatan (rasio Gini) dan kesenjangan infrastruktur pembangunan wilayah.

Ketiga isu kebijakan pembangunan tersebut selalu mencuat dan menjadi tema utama dalam pembahasan kebijakan publik, khususnya ekonomi pembangunan. Di bidang pemerintahan, tema-tema utama kebijakan juga dipusatkan dalam mendorong terselesainya ketiga tema persoalan tersebut, meskipun bidang pemerintahan juga mempunyai banyak persoalan yang terkait dengan isu sosial dan politik nasional.



Beberapa persoalan terkait dengan pemerintahan untuk tahun 2021 tentu harus disesuaikan dengan tema pembangunan tahun tersebut. Pemerintah daerah D.I Yogyakarta telah menetapkan tema pembangunan tahun 2021 adalah: **Peningkatan kualitas SDM berbasis keistimewaan** yang sesuai dengan visi RPJMD pembangunan D.I Yogyakarta **Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**. Peningkatan SDM berbasis Keistimewaan Yogyakarta tentu harus terkait dengan perkembangan jaman, khususnya di era teknologi informasi yang menunjang sektor pemerintahan.

Indikasi Tema
Tahunan pada
RPJMD 2017-2022 :



Di era revolusi industri 4.0 dengan teknologi informasi yang telah mengubah corak kebudayaan manusia, diantaranya adalah manifestasi teknologi dalam bidang pemerintahan dengan konteks kebutuhan percepatan layanan. Tuntutan jaman dalam era “Internet Things” menuntut pemerintah daerah untuk segera berinvestasi dalam bidang teknologi dengan tujuan good governance segera terwujud.

Tema **Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja** mempunyai makna menjadikan manusia Jogja yang berkualitas dan mempunyai kesejahteraan bertaraf minimal cukup, dan baik dalam segala bidang. Tentu saja hal ini berkaitan dengan pencapaian pembangunan seutuhnya di D.I Yogyakarta. Kemajuan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya pengembangan kawasan selatan-selatan Yogyakarta yang sudah dimulai menuntut sektor pemerintahan mengikutinya dengan penerapan berbagai macam teknologi informasi di dalamnya.

B. PERMASALAHAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG PEMERINTAHAN

1. Ketertiban, Ketentraman umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pasca pemilihan legislatif dan presiden menyisakan berbagai gejolak sosial di masyarakat yang tak kunjung terselesaikan. Berbagai perpecahan sosial telah terjadi karena perbedaan dukungan dan pilihan. Masyarakat tidak saja terpecah belah karena dukungan dalam pemilu legislatif ataupun presiden, akan tetapi masyarakat sudah terpolarisasi dan terdeferensiasi dalam berbagai bentuk ideologi tertentu yang mempunyai potensi untuk tetap memicu adanya konflik-konflik sosial.

Data, fakta dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa pasca pemilu tetap mempunyai potensi konflik tinggi. Perdebatan dalam media sosial dan dalam kerumunan masyarakat menunjukkan bahwa situasi sosial masih tetap memanas meskipun pemilu usai di laksanakan. Situasi ini membutuhkan intervensi pemerintah daerah D.I Yogyakarta untuk pencegahan terjadinya konflik sosial.

Persoalan sosial lain yang muncul adalah masyarakat mulai beradaptasi dengan berbagai teknologi informasi dengan kecenderungan gaya hidup individual. Sikap individual, menurunnya relasi sosial, dan apatis masyarakat terhadap jalannya pemerintahan dan lingkungan sosial masyarakat menjadi tumbuh subur, khususnya generasi muda. Generasi anak-anak, remaja dan generasi muda terindikasi tumbuh lebih baik dan cerdas karena dukungan teknologi, akan tetapi mereka mulai kehilangan "etika sosial" dalam bermasyarakat. Persoalan ini bisa memicu kenakalan remaja yang tak terkendalikan jika terjadi pembiaran lebih lanjut.

Persoalan ketertiban, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat menjadi populer karena penegakan perda dan perkara masih belum maksimal. Kesadaran warga masyarakat juga masih kurang untuk mentaatinya. Keresahan masyarakat terhadap kenakalan remaja atau "klithih" msaih juga dirasakan meskipun jauh berkurang.

REKOMENDASI

Pasca pemilu legislatif dan presiden pemerintah daerah perlu membangun program resolusi konflik dalam masyarakat, khususnya antar pendukung kubu dalam pemilihan presiden. Resolusi konflik bisa dilakukan dengan penguatan aparatur pemerintah, pembangunan wacana dalam masyarakat ataupun menumbuhkan forum-forum resolusi konflik dalam kelompok masyarakat ataupun komunitas

kewargaan. Target atau output yang hendak dicapai adalah pengurangan polarisasi pandangan warga terhadap fanatisme dukungan dan polarisasi ideologi lain yang berkembang. Pembangunan wacana demokrasi menjadi penting dalam pendidikan politik kewargaan untuk meyatukan kembali waca ideologi kebangsaan.

Kebijakan pemerintah daerah DI. Yogyakarta dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, maka arah strategis kebijakan program dan kegiatan bisa kearah penguatan pengetahuan warga masyarakat mengenai kebijakan ketentraman, ketertiban umum dan pencegahannya. Pemerintah daerah DI. Yogyakarta bisa membangun program kerja tindakan preventif berupa pendidikan politik kewargaan bersama warga masyarakat atau kelompok komunitas yang tersebar di DI. Yogyakarta untuk menangani berbagai penyakit sosial kewargaan.

Pembinaan terhadap generasi anak-anak, remaja dan kelompok kepemudaan menjadi penting untuk berlanjut. Manifestasi program pembinaan tersebut bermanfaat untuk mendorong kesadaran warga dan komunitas agar terus mengawal generasi muda dalam berkehiduan dan kesadaran sosial.

2. ADAPTASI TEKNOLOGI INFORMASI DALAM BIDANG PEMERINTAHAN

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang pemerintahan cukup maju pesat. Penggunaan teknologi informasi dalam era REVOLUSI INDUSTRI 4.0 di belahan dunia sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Akses Informasi tidak saja menjadi gaya hidup, akan tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat karena pengetahuan internet telah mengubah pola pikir manusia.

Kecepatan layanan pemerintah menjadi penting dalam konteks tersebut dengan investasi teknologi informasi. Pemerintah daerah D.I Yogyakarta telah melakukan investasi teknologi, bahkan pernah menjadi “pelari terdepan” dalam penggunaan informasi teknologi untuk layanan masyarakat maupun layanan informasi.

Penggunaan informasi teknologi tentu berkaitan dengan pola investasi pemerintah daerah untuk terus berkembang dalam pemberian layanan. D.I Yogyakarta masih dirasa kurang berinvestasi dalam teknologi informasi untuk kecepatan layanan ataupun dalam pemberian aksesibilitas bagi warga atau stakeholders dalam mengawal kebijakan daerah.

REKOMENDASI

Pemerintah daerah D.I Yogyakarta memmbutuhkan investasi teknologi infrmasi dalam banyak bidang pemerintah, khususnsya mengenai berbagai data base yang

bisa diakses oleh masyarakat ataupun stakeholders. Pembangunan data base digital online, ataupun pengadaan server yang mendukung jalannya data base di lingkungan pemerintah daerah D.I Yogyakarta.

Pengembangan sistem informasi teknologi penting dilakukan untuk mendukung kecepatan layanan, ketepatan layanan, efektivitas dan efisiensi layanan. Di sisi lain, pengembangan sistem teknologi informasi juga mendorong tercapainya kecepatan informas kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas knerja pemerintah.

3. BIDANG PEMERINTAHAN

D.I Yogyakarta mempunyai prestasi yang baik dalam bidang pemerintahan. Perolehan WTP sepanjang tahun menunjukkan bahwa administrasi bidang pemerintahan menunjukkan bahwa prestasi yang diraih membanggakan.

Beberapa yang masih kurang dalam bidang pemerintahan adalah kualitas tata kelola pemerintahan seperti pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan aset daerah dan meratanya layanan publik oleh aparatur daerah, khususnya Organisasi Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan, maka perlu optimalisasi terhadap beberapa hal seperti

- pengelolaan keuangan daerah
- Kontribusi aset-aset daerah dalam peningkatan Pendapatan Daerah dan
- Peningkatan kualitas layanan public secara merata pada Organisasi Perangkat Daerah.

Layanan pemerintahan desa di D.I Yogyakarta juga perlu mendapat sorotan, dimana pemerintah desa bisa dijadikan ujung tombak layanan. Kelemahan pemerintah desa banyak dibidang layanan masyarakat yang masih lamban. Di sisi lain, pemerintah desa juga masih kurang dalam investasi teknologi informasi untuk memperkuat dan mempercepat layanan pada warga.

REKOMENDASI

Untuk mendorong tercapainya tata pemerintahan yang baik dan bisa membangun layanan publik, maka beberapa rekomendasi kebijakan yang bisa diberikan adalah:

- Transparansi keuangan dan kebijakan publik perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan untuk menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
- Pemerintah Daerah harus lebih meningkatkan lagi kinerja untuk pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

- Pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kredibilitas dalam pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
- Pemberian dukungan kepada pemerintah kabupaten dan desa untuk memperkuat layanan pada warga, khususnya desa-desa yang belum mengaplikasikan teknologi informasi untuk pemberian layanan.
- Pemerintah daerah D.I Yogyakarta perlu menginvestasikan layanan informasi ataupun administratif kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan desa untuk bisa menampilkan layanan terintegrasi, khususnya administratif dan data base.

4. KEBENCANAAN

Potensi bencana alam lokal di D.I Yogyakarta tetap menjadi ancaman tersendiri. Banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, dan kekeringan tetap menjadi agenda sepanjang tahun oleh pemerintah daerah D.I Yogyakarta. Meskipun potensi kebencanaan sering terjadi, pemerintah daerah D.I Yogyakarta bersama komunitas masyarakat dan kewargaan telah mampu menanganinya dengan baik. Hal ini terbukti dari kecepatan penanganan bencana alam lokal yang sering terjadi di D.I Yogyakarta.

REKOMENDASI

Pemerintah daerah D.I Yogyakarta terus menambah program pendidikan kebencanaan bagi warga, khususnya program desa tanggap bencana. Di sisi lain, pendidikan kebencanaan harus diperluas. Selama ini pendidikan kebencanaan banyak dilaksanakan kepada organisasi pengelola kebencanaan. Kedepan, pendidikan kebencanaan perlu dilakukan kepada organisasi komunitas kewargaan yang tumbuh berkembang untuk membangun solidaritas warga terhadap bencana alam yang terjadi.

5. PERTANAHAN DAN TATA RUANG

Kebijakan perluasan tata ruang dan wilayah pembangunan di D.I Yogyakarta, khususnya kawasan selatan-selatan sedang dilakukan. Berbagai perencanaan pembangunan wilayah untuk mendorong keadilan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi dilakukan.

Pembangunan bandara internasional NYIA tentu berdampak pada kemajuan infrastruktur pembangunan daerah dengan perubahan-perubahan kawasan ekonomi yang dilakukan terkait investasi daerah. Peruntukan kawasan pembangunan tersebut membutuhkan perubahan kebijakan kawasan, khususnya peralihan lahan dan peruntukan untuk tata ruangnya.

Persoalan yang muncul adalah perubahan kawasan tersebut bisa saja berpengaruh pada perubahan peruntukan kawasan, khususnya perubahan lahan produktif untuk ketahanan pangan dan area konservasi untuk peruntukan lainnya.

Kawasan ketahanan pangan bisa terganggu jika tidak ada konsep perlindungan dan konservasi di dalamnya.

REKOMENDASI

Kebijakan tata ruang dan wilayah menyangkut pertanahan hendaknya dilakukan dengan arif dan bijaksana. Meskipun perubahan peruntukan lahan tidak bisa dihindari dengan adanya pembangunan infrastruktur wilayah, prinsip-prinsip dasar perlindungan tanah-tanah produktif untuk ketahanan pangan tetap dilindungi dan ditetapkan sebagai jalur hijau.

Pemerintah daerah D.I Yogyakarta perlu menetapkan area-area konservasi, khususnya konservasi tanah dan air sebagai bentuk perlindungan program ketahanan pangan serta konservasi tanah dan air.

6. KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

Urusan Keistimewaan Yogyakarta menjadi penting karena menjadi amanat UU No 13 Tahun 2012, dimana masih banyak regulasi yang belum terselesaikan untuk mempercepat program-program Keistimewaan Yogyakarta atau otonomi khusus sehingga masih menyisakan beberapa persoalan kebijakan yang mendukung terlaksananya program-program Keistimewaan Yogyakarta.

Persoalan lain yang muncul adalah kritik warga terhadap jalannya program dan kegiatan dalam koridor Keistimewaan Yogyakarta. Warga banyak menilai bahwa program dan kegiatan masih belum tepat sasaran, dimana konstruksi program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta masih banyak pada infrastruktur kebudayaan dibandingkan dengan pembangunan nilai-nilai Keistimewaan Yogyakarta. Sisi lain yang diwacanakan adalah salah satu tujuan Keistimewaan Yogyakarta dalam meningkatkan derajat kesejahteraan warga.

Proses penyusunan program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta masih belum maksimal, dimana bentuk perencanaan program dan kegiatan perlu didukung oleh banyak pihak dan sumberdaya aparatur yang menguasai bidang Keistimewaan Yogyakarta.

Rekomendasi Kebijakan

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan otonomi khusus, maka perumusan kegiatan dalam penyusunan RKPD Tahun 2021 arah kebijakan adalah

Penguatan regulasi pendukung urusan-urusan keistimewaan DI Yogyakarta bisa terselesaikan.

Pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa disusun Dengan berlandaskan semangat keistimewaan yang meliputi Sangkan Paraning Dumadi, Hamemayuning Bawana, Manunggaling Kawulo Gusti. Semangat keistimewaan tersebut memaknai beberapa aspek pembangunan Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu dalam Pembangunan keistimewaan di Daerah Istimewa perlu berbagai usaha dalam rangka mewujudkan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya , Penataan Kawasan Budaya Pendukung Keistimewaan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan dan Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Arah kebijakan untuk Keistimewaan Yogyakarta lebih bersifat pemberdayaan dan pembangunan nilai-nilai budaya D.I Yogyakarta untuk bisa menjadi bagian dari nilai-nilai kehidupan kewargaan, khususnya generasi muda. Di sisi lain, pemerataan capaian program dan kegiatan program Keistimewaan Yogyakarta hendaknya dilihat kembali untuk bisa dinikmati oleh banyak warga ataupun komunitas kewargaan.

Pelaksanaan program Keistimewaan Yogyakarta banyak dinilai cenderung tertutup, mulai dari perencanaan, implementasi program dan kegiatan, hingga output dan outcomenya. Keistimewaan Yogyakarta perlu didukung dengan teknologi informasi untuk mendorong proses transparansi dan akuntabilitasnya. Di sisi lain, penggunaan teknologi informasi dalam mendorong akselerasi program agar tepat sasaran juga dibutuhkan. Pengembangan sumberdaya manusia, khususnya ASN yang menandai semua program dan kegiatan di dalamnya perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.